

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat $110^{\circ}14'54,75''$ hingga $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ hingga $7^{\circ}30'0''$ Lintang Selatan. Wilayah ini mencakup luas 1.019,27 km², terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa, dan 27 kelurahan, dengan ibu kota di Ungaran. Secara administratif, Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di utara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali di timur, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal di barat. Keunikan wilayah ini adalah keberadaan Kota Salatiga yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Semarang, namun secara administratif terpisah.

Topografi Kabupaten Semarang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan vulkanik, dengan ketinggian berkisar antara 318 hingga 1.450 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Semarang dikelilingi oleh beberapa pegunungan, seperti Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Telomoyo, yang mempengaruhi iklim mikro dan potensi wilayah ini sebagai daerah resapan air yang penting. Secara hidrologi, Kabupaten Semarang memiliki kekayaan sumber daya air yang melimpah, termasuk 51 sungai dengan total panjang 350 km dan debit air

mencapai 2.668.480 liter per detik. Terdapat juga sumber air dangkal/mata air dengan kapasitas 7.331,2 liter per detik yang tersebar di 15 kecamatan.

Letak geografis Kabupaten Semarang yang berada di jalur penghubung antara Yogyakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar) menjadikannya sebagai kawasan strategis dalam distribusi barang dan jasa. Kota Ungaran berperan sebagai hinterland bagi Kota Semarang, mendukung aktivitas permukiman, pertanian, dan industri, serta menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) metropolitan Semarang atau kawasan strategis Kedungsepur.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.053.094 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020. Dari jumlah tersebut, 525.064 jiwa adalah laki-laki dan 528.030 jiwa adalah perempuan. Hal ini menunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 99,44 yang berarti terdapat 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Semarang berada dalam kelompok usia produktif. Sebanyak 60,71% penduduk berusia di bawah 40 tahun, yang terdiri dari generasi milenial (25,04%), generasi Z (25,24%), dan post generasi Z (10,43%). Sementara itu 39,29% penduduk berusia 40 tahun ke atas, mencakup generasi X (22,90%), generasi boomer (14,06%), dan generasi pre-boomer (2,33%).

Rata-rata kepadatan penduduk adalah sekitar 1.033 jiwa per km², akan tetapi kepadatan ini tidak merata di seluruh wilayah dikarenakan beberapa kecamatan seperti Ungaran Barat dan Ungaran Timur memiliki kepadatan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Semarang menunjukkan tren yang stabil. Dari tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk meningkat dari 930.727 jiwa menjadi 1.053.094 jiwa, yang mencerminkan laju pertumbuhan tahunan sekitar 1,2%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,96% menurun dari 8,15% pada tahun 2015. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Dari segi ketenagakerjaan, mayoritas penduduk Kabupaten Semarang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Tingkat partisipasi Angkatan kerja mencapai 67,5% dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,2%, ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja aktif dalam kegiatan ekonomi.

Dalam aspek pendidikan, Kabupaten Semarang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun mencapai 99,5% sementara pada kelompok usia 13-15 tahun mencapai 97,8%. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Dalam hal mobilitas, Kabupaten Semarang mengalami arus migrasi masuk yang cukup signifikan. Banyak penduduk dari daerah lain yang datang untuk bekerja atau menetap, terutama di wilayah-wilayah yang berkembang pesat seperti

Ungaran dan Bawen. Mobilitas ini berkontribusi pada dinamika demografis dan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, kondisi demografis Kabupaten Semarang menunjukkan karakteristik yang dinamis dengan pertumbuhan penduduk yang stabil, distribusi usia yang mendukung produktivitas, dan peningkatan dalam aspek sosial-ekonomi. Data ini penting sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

2.1.3 Kondisi Sosial Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang sebagai wilayah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dinamika sosial yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.098.572 jiwa pada tahun 2025, meningkat 0,81% dari tahun sebelumnya, struktur sosial masyarakat mengalami perubahan yang mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan daerah.

Dalam bidang kesehatan, Kabupaten Semarang terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis menjadi prioritas untuk memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Semarang juga berfokus pada pembangunan desa. Jumlah desa mandiri meningkat dari 44 desa pada tahun 2021 menjadi 47 desa pada tahun 2022, sementara jumlah desa tertinggal menurun dari 5 desa menjadi 2 desa

dalam periode yang sama. Perkembangan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam aspek perlindungan sosial, partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan. Proporsi peserta program ini mencapai 66% pada tahun 2021 dan 55% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan sosial dalam menghadapi risiko ketenagakerjaan.

Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Semarang juga ditandai dengan keberagaman budaya dan agama. Kerukunan antarumat beragama dan toleransi menjadi nilai yang dijunjung tinggi, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif bagi pembangunan. Secara keseluruhan, kondisi sosial Kabupaten Semarang menunjukkan kemajuan yang positif dalam berbagai aspek. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan desa yang berkelanjutan menjadi indikator keberhasilan pembangunan sosial di daerah ini. Namun, tantangan seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.

2.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Semarang

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan visi dan misi sebagai landasan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Visi dan misi ini tercantum dalam dokumen

resmi pemerintah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi Kabupaten Semarang untuk periode 2021-2026 adalah:

“Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI), dengan Semangat Gotong Royong, berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Semarang untuk membangun masyarakat yang bersatu dalam keberagaman, memiliki kedaulatan dalam menentukan arah pembangunan, berkepribadian yang kuat, sejahtera secara ekonomi dan sosial, serta mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam mewujudkan visi tersebut.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan tujuh misi strategis yang menjadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Semarang:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian, pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa, serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan dan beradab.
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan Lestari.
7. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang berkepribadian dan berkarakter.

Misi pertama menekankan pada pengembangan SDM sebagai aset utama dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Semarang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing di era globalisasi. Misi kedua fokus pada penguatan sektor ekonomi daerah melalui pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang berkelanjutan. Konsep INTANPARI menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Misi ketiga hingga ketujuh mencakup aspek pemerintahan yang baik, pembangunan infrastruktur yang merata, penegakan hukum dan HAM, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Keseluruhan misi ini saling terkait dan mendukung pencapaian visi Kabupaten Semarang yang BERDIKARI.

Dengan menetapkan visi dan misi yang jelas, Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki arah dan tujuan yang terukur dalam melaksanakan program pembangunan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Semarang yang maju, mandiri, tertib, dan Sejahtera.

2.2 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat daerah. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak melalui integrasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menetapkan

lima klaster hak anak sebagai indikator penilaian KLA, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus.

Sejak peluncuran program KLA, jumlah daerah yang meraih predikat KLA terus meningkat. Pada tahun 2023, Kemen PPPA menganugerahkan penghargaan KLA kepada 360 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 19 kategori Utama, 76 kategori Nindya, 130 kategori Madya, dan 135 kategori Pratama. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Beberapa daerah menunjukkan pencapaian luar biasa dalam implementasi KLA. Kota Surakarta misalnya, yang berhasil meraih penghargaan KLA kategori Utama pada tahun 2022, menjadikannya sebagai salah satu kota yang konsisten dalam memenuhi indikator KLA. Keberhasilan ini didukung oleh penyediaan ruang publik ramah anak, seperti Taman Cerdas dan fasilitas bermain yang aman dan edukatif.

Provinsi Jawa Tengah menjadi pelopor dalam implementasi KLA, hal ini dikarenakan seluruh Kabupaten/Kotanya telah meraih predikat Kabupaten/Kota Layak Anak pada tahun 2023. Capaian ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang 100% daerahnya berstatus layak anak. Meski demikian, penting untuk diketahui bahwa predikat tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Hal tersebut berarti meskipun semua daerah telah diakui sebagai KLA, akan tetapi tingkat pencapaiannya masih beragam. Sebagai contoh, Kabupaten Semarang pada tahun 2023 memperoleh

penghargaan KLA dalam kategori Pratama. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan sebagai KLA bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari proses berkelanjutan menuju peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di setiap wilayah.

Program KLA juga mendorong daerah untuk mengembangkan inovasi dalam pemenuhan hak anak. Kota Surabaya misalnya yang telah diakui sebagai Kota Layak Anak Dunia pertama di Indonesia pada tahun 2023 berkat lima langkah inovatif yang diterapkan dalam perlindungan anak. Pengakuan ini menunjukkan bahwa pendekatan kreatif dan partisipatif dapat mempercepat pencapaian tujuan KLA.

Implementasi KLA tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak. Program Indonesia Layak Anak 2030 menargetkan terbentuknya 65 juta Keluarga Ramah Anak, 79.075 Desa/Kelurahan Layak Anak, dan 6.793 Kecamatan Layak Anak. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Evaluasi dan verifikasi KLA dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program. Kabupaten Maros contohnya yang menjalani verifikasi lapangan pada tahun 2024 setelah meraih penghargaan kategori Nindya pada tahun 2023, verifikasi lapangan itu dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan statusnya. Proses ini mendorong daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan program yang berpihak pada anak.

Secara keseluruhan, implementasi KLA di Indonesia menunjukkan tren positif dengan semakin banyaknya daerah yang berkomitmen dalam pemenuhan hak anak. keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Meski demikian tantangan masih ditemukan, terutama dalam memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak-haknya secara utuh sehingga diperlukan upaya berkelanjutan dan inovatif untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030.

2.3 Sekolah Ramah Anak (SRA)

Konsep Ramah Anak (SRA) merupakan inisiatif strategis yang diusung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung pemenuhan hak-hak anak. SRA bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan yang berkualitas tanpa diskriminasi serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah di lingkungan sekolah.

Implementasi SRA didasarkan pada lima prinsip utama: non diskriminasi, kepentingan terbagik bagi anak, hak untuk hidup tumbuh dan berkembang, partisipasi anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam merancang kebijakan dan program di tingkat satuan pendidikan, memastikan bahwa setiap aspek operasional sekolah mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak secara holistik.

Dalam praktiknya, SRA mencakup enam komponen atau indikator utama antara lain:

- 1) Kebijakan Sekolah yang Mendukung Hak Anak
- 2) Pelaksanaan Kurikulum yang Ramah Anak
- 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terlatih dalam Hak-Hak Anak
- 4) Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kenyamanan dan Keamanan Anak
- 5) Partisipasi Anak dalam Pengambilan Keputusan
- 6) Keterlibatan Orang Tua Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Proses Pendidikan.

Meskipun konsep SRA telah diperkenalkan secara luas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat hasil penelitian Sekolah Ramah Anak di beberapa sekolah di berbagai Kabupaten/Kota yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program SRA belum sepenuhnya optimal disebabkan oleh dominasi aktor internal sekolah dalam pelaksanaan program dan kurangnya pembaruan program secara berkala, yang mengakibatkan kasus kekerasan masih terjadi dengan pelaku, korban, dan bentuk kekerasan yang berbeda.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, terdapat 22.170 satuan pendidikan di Indonesia yang telah mengadopsi prinsip-prinsip SRA. Namun, angka ini masih relatif kecil dibandingkan dengan total jumlah satuan pendidikan di Indonesia, yang mencapai lebih dari 218.600. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang perlu didorong untuk mengimplementasikan SRA guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Implementasi SRA telah menunjukkan dampak positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak. Sebuah studi menunjukkan

bahwa sebanyak 96% responden, yang terdiri dari siswa, guru, dan orang tua, merasakan peningkatan keamanan di sekolah setelah penerapan SRA. Selain itu, 89% siswa menyatakan merasa lebih nyaman dan senang dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, serta partisipasi orang tua dalam mendukung program sekolah meningkat sebesar 75%. Meski demikian, tantangan dalam implementasi SRA masih ditemukan, terutama terkait dengan pengaruh teknologi yang semakin canggih serta lingkungan keluarga dan sosial yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip SRA dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, Sekolah Ramah Anak merupakan pendekatan yang komprehensif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung hak-hak anak. Dengan implementasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, SRA dapat menjadi landasan dalam membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

2.4 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang

2.4.1 Gambaran Umum Dinas P3AKB Kabupaten Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial yang berkeadilan dan inklusif. Melalui berbagai

program dan layanan, DP3AKB berupaya meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, serta keluarga di wilayah Kabupaten Semarang.

Dalam bidang pendidikan, DP3AKB Kabupaten Semarang juga merintis program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

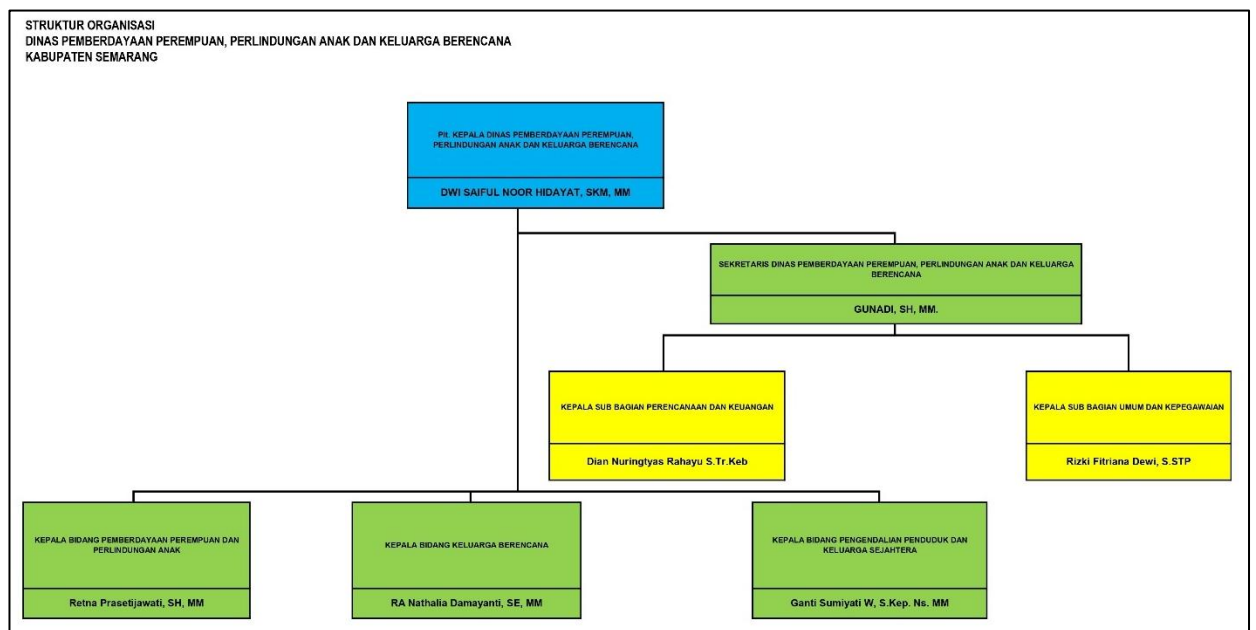
Kelompok sasaran dari berbagai program DP3AKB Kabupaten Semarang meliputi perempuan, anak-anak, remaja, serta keluarga secara keseluruhan. Program-program tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing kelompok, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, dan penguatan ketahanan keluarga. DP3AKB Kabupaten Semarang juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui berbagai kampanye dan pelatihan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan anak serta mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, Dinas P3AKB Kabupaten Semarang terus melakukan evaluasi dan pengembangan program berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup pengumpulan data kasus kekerasan, tingkat partisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB),

serta feedback dari penerima layanan untuk memastikan program yang dijalankan efektif dan tepat sasaran.

2.4.2 Struktur Organisasi Dinas P3AKB Kabupaten Semarang

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas P3AKB
Kabupaten Semarang**



Sumber: Dinas P3AKB Kabupaten Semarang

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Pimpinan Tertinggi:

Dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas, yaitu Dwi Saiful Noor Hidayat, SKM, MM.

2. Sekretaris Dinas:

Membantu pelaksanaan tugas dinas secara administratif dan operasional, dijabat oleh Gunadi, SH, MM.

3. Sub Bagian di Bawah Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: Dian Nuringtyas Rahayu S.Tr.Keb.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Rizki Fitriana Dewi, S.STP.
4. Tiga Bidang Utama:
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Retna Prasetiwijati, SH, MM.
 - b. Bidang Keluarga Berencana: RA Nathalia Damayanti, SE, MM.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera: Ganit Sumiyati W, S.Kep, Ns, MM.

Struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang jelas untuk mendukung implementasi program-program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kabupaten Semarang.

2.4.3 Visi dan Misi Dinas P3AKB Kabupaten Semarang

VISI:

Menjadi Penggerak Utama Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

MISI:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui peningkatan akses pelaksanaan program KB yang bermutu
3. Mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera melalui pemberdayaan perempuan
4. Mewujudkan budaya kerja yang berlandaskan pengabdian, keikhlasan, disiplin, dan komitmen yang kuat

2.4.4 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3AKB Kabupaten Semarang

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unsur pelaksana teknis dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang. Keberadaan bidang ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai bagian dari kelompok rentan dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah yang responsif gender dan ramah anak, bidang ini memainkan peran strategis dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan dan program yang berpihak pada perempuan dan anak.

Secara umum, bidang ini bertugas melaksanakan sebagian fungsi teknis operasional dinas dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bidang ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan terpenuhinya hak-hak dasar perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Adapun tugas pokok dari Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, bidang ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis dan strategi pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan daerah;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan peran perempuan dalam sektor publik dan ekonomi, serta fasilitasi organisasi perempuan;
3. Melaksanakan kegiatan perlindungan anak yang mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, fasilitasi layanan rujukan, dan penguatan kelembagaan perlindungan anak;
4. Mengoordinasikan upaya lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak, termasuk bekerja sama dengan sekolah, lembaga layanan, organisasi masyarakat, dan lembaga penegak hukum;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan;
6. Mengelola data terpisah berdasarkan jenis kelamin dan usia untuk mendukung kebijakan yang berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang PPPA tidak hanya berperan dalam aspek administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi sosial di masyarakat. Peran ini menjadi sangat penting dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak dan pembangunan yang inklusif serta berkeadilan gender di Kabupaten Semarang.